

PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENERAPKAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PUBLIKASI INFORMASI DESA DI ERA GLOBALISASI

Mukhsin

Fakultas Teknik Universitas Wiralodra, Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa barat,
mukhsin_qrpratama@yahoo.com, mukhsin.ft@unwir.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik bidang ekonomi, politik, seni, kebudayaan dan dunia pendidikan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara dalam melakukan aktifitas manusia. Pembangunan pedesaan mengalami perubahan signifikan sejak digitalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perkembangan TIK yang semakin pesat dalam usaha mengefektifkan layanan kepada masyarakat harus dilakukan sampai pada tingkat Desa. Keberadaan TIK selain dapat meningkatkan pelayanan juga bermanfaat dalam proses pengolahan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, mendukung pengambilan keputusan dan banyak manfaat lainnya. Pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan TIK. Dan sistem informasi merupakan perpaduan antara teknologi informasi dan aktivitas orang. Tetapi jika teknologi informasi yang tercanggih sekalipun tidak ada yang mengoperasikan, maka akibatnya sistem informasi tidak berjalan maksimal. Perpaduan teknologi informasi dan manusia pengelola merupakan kunci suksesnya penerapan sistem informasi. Pekerjaan yang berulang-ulang dapat digantikan oleh sistem untuk menyederhanakan pekerjaan. Berjalannya peran sistem informasi menyebabkan kinerja organisasi menjadi semakin efisien dan efektif.

Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK, Desa, Sistem Informasi

ABSTRACT

Technological developments have influenced all aspects of life in the fields of economy, politics, art, culture and education. Every innovation was created to provide many conveniences and various ways of doing human activities. Rural development has experienced significant changes since the digitalization of Information and Communication Technology (ICT). The rapid development of ICTs in efforts to make services effective for the community must be carried out at the village level. The existence of ICTs in addition to improving services is also useful in data processing that can be used for development planning, supporting decision making and many other benefits. Rural development has experienced significant changes in its concept and process. The concept of development is no longer limited to the agrarian sector and basic infrastructure but leads to the development of ICT. And information systems are a combination of information technology and people's activities. But if even the most sophisticated information technology doesn't operate, then the information system will not run optimally. The combination of information technology and human management is the key to the successful implementation of information systems. Repetitive work can be replaced by a system to simplify work. The ongoing role of information systems causes organizational performance to become more efficient and effective.

Keywords : Information and Communication Technology, ICT, Villages, Information Systems

I. PENDAHULUAN

Kemampuan desa untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat harus didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa untuk menunjang bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan.

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut UU tersebut juga menjelaskan bahwa, pembangunan desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.[4]

Salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh desa adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari perkembangan kebutuhan manusia. Keberadaan TIK selain dapat meningkatkan pelayanan juga bermanfaat dalam proses pengolahan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, mendukung pengambilan keputusan dan banyak manfaat lainnya.

Pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Konsep pembangunan tidak lagi sebatas pada sektor agraris dan infrastruktur dasar tapi mengarah pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Salah satu teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi menggunakan media aplikasi dan internet yang dapat di akses dari mana saja, sehingga pemasukan data dapat dilakukan dari mana saja dan dapat dikontrol dari satu tempat sebagai sentral.

Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan adalah belum meratanya infrastruktur dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berpengaruh pada pemanfaatan TIK di tingkat desa. Akibat dari menghadapi berbagai permasalahan terkait pembangunan dan keterbatasan infrastruktur, maka penggunaan dan pemanfaatan TIK tidak menjadi prioritas utama bagi pemerintah desa. Hal tersebut tentunya akan berjalan selaras jika hal-hal tersebut dapat teratasi sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih sederhana dan kinerja organisasi menjadi semakin efisien dan efektif.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi (Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2006: 6).[7]

Teknologi informasi juga adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.[7]

TIK sendiri merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Sementara para ahli menjelaskan mengenai pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Eric Deeson, teknologi informasi dan komunikasi adalah kebutuhan manusia didalam mengambil dan memindahkan, mengolah dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Susanto, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data baik itu untuk memperoleh suatu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah.[3]

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari teknologi

Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang memproses atau mengolah dan memproduksi informasi serta menyebar-luaskan atau memuliksikannya seperti komunikasi media.

TIK sendiri harus memiliki karakteristik yang mampu mendukung untuk penggunaannya diantaranya, yaitu ; TIK mampu menyediakan informasi, mudah digunakan, handal, memiliki siklus inovasi yang cepat serta waktu respon minimal.

E-Government

E-Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.[3]

E-government memungkinkan masyarakat untuk dapat berinteraksi dan menerima layanan dari pemerintahan lokal, daerah, maupun pusat selama 24/7 (24 jam sehari 7 hari seminggu).[5]

Manfaat TIK dalam E-Government

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh pemerintahan memunculkan beberapa keuntungan :[2]

1. Meningkatkan efisiensi, penggunaan TIK dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagi data atau informasi di dalam maupun antar pemerintahan.
2. Meningkatkan pelayanan, penggunaan TIK dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Membantu mencapai suatu kebijakan tertentu, penggunaan TIK dapat membantu menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga pihak-pihak terkait dapat berbagi ide dan informasi terkait dengan suatu kebijakan tertentu.
4. Membantu kontribusi terhadap kebijakan ekonomi, penggunaan TIK dalam *e-government* dapat mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah.
5. Meningkatkan kontribusi terhadap reformasi, penggunaan TIK telah mengubah atau mereformasi berbagai bidang, seperti: memperbaiki transparansi dan fasilitasi berbagi informasi.
6. Meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakatnya, penggunaan TIK dapat

meningkatkan *good governance* melalui peningkatan trans-paransi, mengurangi korupsi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah.

Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa adalah proses dan aplikasi/media berbasis komputer dan internet, pengelolaan Informasi Desa, mendukung fungsi dan tugas pemerintah desa, yang didalamnya memuat administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran, layanan publik, transmisi Informasi atas ke bawah atau sebaliknya, komunikasi lintas sektoral, komunikasi Pemerintah Desa dan Masyarakat, dan sebagainya.[1]

Berdasarkan pengertian diatas, jenis aplikasi yang dibutuhkan suatu desa bisa saja membutuhkan lebih dari satu aplikasi, misalnya Aplikasi Validasi Penduduk untuk pengelolaan data dan pelayanan kependudukan seperti (KTP, KK, Akta Kelahiran dan surat Keterangan), SISKEUDES untuk mengelola keuangan/anggaran desa, aplikasi profil desa, Media sosial (Facebook, Twiter, whatsapp, email, google drive, Blogg) dan sebagainya.

II. METODE

Metode Penulisan Karya Ilmiah

Penulisan karya ilmiah ini dimaksud agar penulis dapat mendeskriptifkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan sistem informasi dalam publikasi informasi desa. Dalam Penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penulisan deskriptif.

Metode deskriptif dapat kita diartikan sebagai cara atau proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menjabarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian yang dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan benar apa adanya tanpa ada pengurangan dan penambahan.

Penelitian dilakukan melalui studi kasus dengan melakukan wawancara dan observasi (secara purposif). Penelitian akan mengeksplorasi

pemanfaatan TIK dilakukan di tingkat desa dalam mendukung pemba-ngunan dan kemandirian desa, memberikan gambaran mengenai pemanfaatan TIK di desa, dan menangkap keberhasilan desa dalam melakukan kegiatan pembangunan dengan dukungan TIK.

Peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada narasumber mengenai kondisi desa sebelum pemanfaatan TIK, serta bagaimana kondisi setelah memanfaatkan TIK. Kondisi tersebut dilihat dari sisi sumber daya manusia dan proses pelayanan publik di dalam pemerintahan desa.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah statistik deskriptif dan analisis kualitatif yang dimana data yang telah dikumpulkan dijabarkan kedalam tulisan karya ilmiah serta ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik.

Dalam proses penulisan karya ilmiah ini penulis juga membaca beberapa buku mencoba untuk mengaitkan dengan beberapa teori yang dianggap berkaitan oleh penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pencarian data-data yang dibutuhkan serta menganalisis data yang terkumpul penulis mendapatkan hasil untuk menulis hasil karya ini. Diharapkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis bisa menjabarkan dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa macam kegiatan administrasi pemerintahan di desa yang wajib dilaksanakan dengan tertib, terdiri atas Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan dan Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.[3]

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan kegiatan Pemerintahan Desa meliputi permasalahan internal berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau

kompetensi Aparat Pemerintah Desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri. Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat.

Karakteristik E-Government

Pelayanan publik di berbagai negara maju telah mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi. Artinya, semua proses layanan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat. Sistem layanan tersebut dikenal dengan sebutan *e-government*. Tujuan besar penerapan *e-government* adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana layanan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.[3]

Sesuai dengan solusi *e-government* yang dikemukakan oleh Backus dalam Palvia dan Sharma (2007), terdapat tiga tahap solusi *e-government*, yaitu tahap informasi, tahap interaksi dan tahap transformasi.[5]

Dalam tahap informasi, *e-government* menyediakan informasi kepada pihak terkait, yaitu dalam hal ini pemerintahan desa kepada pemangku kepentingan (masyarakat, dunia usaha, pemerintah). Misalnya informasi lokal/nasional (visi, misi, dan struktur organisasi, alamat, nomor telepon, undang-undang, peraturan, regulasi, berita pemerintahan, dan sebagainya), sedangkan untuk informasi dunia usaha seperti informasi bisnis, alamat, nomor telepon, jam kerja, undang-undang, peraturan (regulasi terkait dunia usaha). Tahap interaksi memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berinteraksi dengan pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia.

Pemerintah menyediakan saluran interaktif yang melibatkan *stakeholder* seperti: *download* form dari situs *web*, mengisi *form online*, *e-mail*, grup diskusi (forum), poling, kuisisioner, dan sebagainya. Tahap ketiga atau tahap transformasi memungkinkan semua layanan pemerintahan yang didukung TIK terintegrasi dapat digunakan oleh setiap masyarakat yang memiliki akun personal.

Tabel 1. Solusi *e-Government*

	<i>Government to Citizens</i>	<i>Government to Business</i>	<i>Government to Government</i>
Tahap 1: Informasi	informasi lokal/nasional (visi misi dan struktur organisasi, alamat, nomor telepon, undang-undang, peraturan, regulasi, berita pemerintahan).	informasi bisnis, alamat, nomor telepon, jam kerja, undang-undang, peraturan, regulasi terkait bisnis.	<i>knowledge base</i> (intranet), <i>knowledge management</i> (LAN).
Tahap 2: Interaksi	mendownload form dari situs web pemerintah, dapat mengisi form, <i>e-mail</i> , grup diskusi (forum), poling, kuisisioner, dan sebagainya.	mendownload form dari situs web, dapat mengisi form, <i>email</i> , dan sebagainya.	<i>e-mail</i> , <i>knowledge database</i> interaktif, penanganan complain.
Tahap 3: Transformasi	Situs web yang telah dipersonalisasi dengan akun personal yang terintegrasi untuk semua layanan.	Situs web yang telah dipersonalisasi dengan akun personal yang terintegrasi untuk semua layanan bisnis.	Basis data terintegrasi.

Sumber: Backus dalam Palvia dan Sharma (2007). [5]

1. *Government to Citizen (G2C)*

Model *e-government* menggambarkan hubungan antara pemerintah dengan *stakeholder* melalui TIK, yaitu hubungan pemerintah dengan masyarakat (*citizen*), pemerintah dengan dunia usaha (*business*), dan hubungan antara pemerintah dengan sesama pemerintah (*government*).

2. *Government to Business (G2B)*

Hubungan pemerintah dengan dunia usaha (G2B) dilakukan pemerintah desa melalui penyebaran informasi mengenai hasil pertanian, potensi pariwisata, produk-produk UKM, festival/karnaval budaya, dan kuliner.

3. *Government to Government (G2G)*

Dalam hal koordinasi secara informal, dilakukan kerjasama maupun koordinasi yang dilakukan dengan desa-desa lain melalui forum komunitas TIK. Forum komunitas TIK merupakan wadah gerakan sosial untuk mendorong terwujudnya pemerintah desa yang ramah dengan informasi dan teknologi yang murah, legal dan positif. Serta mendorong agar desa bisa memperoleh kedaulatan atas data dan sumberdaya yang ada untuk kesejahteraan.[2]

Konsep Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan

dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.

Dalam Konteks Desa, UU 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.[6] Sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan. Data tersebut dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa serta semua pemangku kepentingan.[1]

Pengembangan sistem informasi desa sebagai suatu sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Desa harus selaras dengan perkembangan sarana dan kapasitas pemerintah desa, dan dipergunakan desa untuk perencanaan desa, melaksanakan akuntabilitas, transparansi dan menyelenggarakan pelayanan publik. sistem informasi desa yang dikelola desa harus dapat memenuhi kebutuhan pihak supra desa untuk memonitor dan mengevaluasi keadaan dan perkembangan desa. Kepentingan utama desa sendiri akan tata kelola data dan informasi adalah untuk memudahkan pekerjaan perangkat desa dan memudahkan warga dalam mengakses informasi.

Sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa, pengelolaan data dan informasi di desa meliputi data pemerintahan umum, kependudukan, keuangan desa, pembangunan, kegiatan BPD, lembaga kemasyarakatan, dan profil desa. [1] Dengan demikian istilah mengembangkan sistem

informasi desa di dalam UU Desa memang tepat dan harus dimengerti sebagai peningkatan sistem yang sebelumnya bersifat manual tradisional menjadi sistem yang memanfaatkan sepenuhnya keunggulan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Tujuan Pengembangan SID

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan sistem informasi desa haruslah mempunyai tujuan untuk :

1. Pelayanan, administrasi, dan pelaporan yang akurat: sistem pengelolaan data dan informasi yang mendukung pelayanan, administrasi, dan pelaporan.
2. Transparansi dan akuntabilitas: pengelolaan data dan informasi yang baik akan mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan pilar dasar tata kelola yang baik.
3. Perencanaan dan penganggaran berbasis bukti: informasi serta data yang berkualitas dan selalu diperbarui akan sangat membantu perencanaan pembangunan dan penganggaran.
4. Memudahkan pemantauan dan evaluasi hasil: sistem informasi desa sekaligus berfungsi memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi bagaimana anggaran desa digunakan (*output*), hasilnya (*outcome*), dan dampaknya.

Dengan tujuan seperti diuraikan di atas, informasi dan data kritis yang perlu tersedia dalam sistem informasi desa meliputi beragam isu, diantaranya :

1. Kependudukan; Keadaan dan perubahan daftar penduduk desa, pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, tingkat pendidikan, kepemilikan identitas hukum, dan pekerjaan.
2. Pendidikan; Kondisi khusus pendidikan anak-anak usia sekolah, termasuk status bersekolah, tidak bersekolah, dan putus sekolah yang dipilah berdasarkan gender.
3. Kesehatan; Data dan informasi wabah, penyakit endemik, data ibu hamil dan kepatuhan pemeriksaan kehamilan/pre-natal/postnatal, data anak balita dan status gizi, angka kematian ibu dan bayi. Juga termasuk informasi mengenai fasilitas dan tenaga kesehatan tingkat desa. Kondisi sarana dan prasarana dasar Perumahan, air bersih,

dan sanitasi; menggambarkan keadaan perumahan menurut kelayakan kesehatan lingkungan, termasuk akses air bersih dan fasilitas sanitasi.

4. Kemiskinan dan kerentanan; Identifikasi rumah tangga berdasarkan status sosial ekonomi, khususnya rumah tangga miskin dan rentan, termasuk yang dikepalai oleh perempuan dan/atau disabilitas, penerima program perlindungan sosial.
5. Pembangunan Perencanaan; data rencana pembangunan jangka menengah, rencana tahunan, hasil kegiatan-kegiatan pembangunan, dan inventaris proyek.
6. Keuangan desa; Data anggaran desa, penggunaan anggaran, dan penyertaan modal oleh desa, Aset desa, Daftar aset dan perubahan aset desa, keadaannya, status penguasaan, baik merupakan sarana prasarana fisik maupun nonfisik (misalnya penyertaan modal)
7. Organisasi kemasyarakatan; Menggambarkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa dan kegiatan-kegiatannya.
8. Kegiatan ekonomi masyarakat; Menggambarkan jenis-jenis pekerjaan masyarakat, kegiatan pertanian, industri, perdagangan, termasuk kepemilikan lahan.
9. Informasi kawasan perdesaan; Sarana prasarana kawasan, tata guna lahan, dan lingkungan.

Peran dan Manfaat Sistem Informasi Desa

Ada beberapa peran dan manfaat dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem informasi desa yaitu sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Pembangunan Desa
Data dasar kependudukan yang dijadikan dasar penentuan perencanaan menjadi sangat penting dilakukan.
- 2) Keterbukaan Informasi
Sebagai bentuk praktik demokrasi maka setiap warga diberikan hak untuk mengetahui informasi terkait rencana pembuatan kebijakan dan prosesnya.
- 3) Pemerintah desa lebih akuntabel
Dengan adanya keterbukaan informasi yang mudah diakses warga, pemerintah desa akan dituntut untuk lebih akuntabel
- 4) Pelayanan publik akan lebih baik, efektif, dan efisien

- 5) Masyarakat mudah memperoleh informasi dan dokumen desa sesuai dengan yang diperlukan.
- 6) Masyarakat dapat mengawal secara aktif usulan Musrenbangdes, jika portal desa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan daftar usulan desa dan dokumen-dokumen alokasi anggaran desa.
- 7) Jika aplikasi media interaktif diintegrasikan ke dalam sistem (Laman Blog, Laman FB, Whatsap, Papan Informasi) maka ruang kontrol dan pelibatan warga terhadap penyediaan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa desa dapat berfungsi optimal.
- 8) Mempercepat pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan.
- 9) Menjadi alat untuk mendorong kesadaran bersama warga agar terlibat dalam proses perencanaan sehingga dapat memperbaiki kualitas Perencanaan Desa yang Partisipatif.
- 10) Dapat menjadi instrumen keterbukaan informasi publik dan membantu dalam mempromosikan desa.
- 11) Memudahkan Proses Penyebaran Informasi dan Komunikasi Lintas Sektoral, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten Sehingga dapat berjalan secara efektif dan Efisien.

Kesiapan Penerapan TIK pada Administrasi Desa

Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dalam usaha untuk mencapai keberhasilan *e-Government* dalam layanan administrasi desa yang berbasis *Information Technology* (IT). faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan TIK pada administrasi desa dinilai masih kurang dan belum memadai. Kurangnya pengetahuan SDM/pegawai tentang TIK menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengadaan administrasi desa berbasis TIK. Hal tersebut juga dikarenakan oleh tidak meratanya penyebaran tenaga ahli yang hanya berpusat dikota-kota besar. Bahkan untuk daerah-daerah terpecil, jumlah tenaga-tenaga ahli masih sedikit bahkan masih sangat jarang.
2. Sarana dan Prasarana

Dalam usaha penerapan TIK pada Administrasi Desa, penggunaan sarana dan prasarana IT menjadi syarat utamanya. Penggunaan sarana yang berbasis IT ini mencakup dari sarana itu sendiri dan sarana penunjang keberlangsungan layanan. Sarana IT di desa-desa dapat dikatakan sudah memadai walaupun masih belum merata. Karena masih terdapat perangkat-perangkat dengan spesifikasi rendah yang belum di-*upgrade* dan sarana pendukung seperti jaringan internet yang belum dipasang secara merata. Padahal semakin canggih sarana IT maka semakin bagus layanan yang dapat diberikan pada masyarakat.

3. Anggaran
Desa yang akan menerapkan *e-Government* untuk pelayanan publik harus mengalokasikan anggaran yang diterima dari APBN/APBD. Tiap daerah masih mengalami kendala dalam besaran anggaran yang diperlukan untuk membangun sistem, namun di beberapa daerah sudah ada rencana untuk realisasi anggaran dalam pelaksanaan layanan yang berbasis IT. Namun ada juga daerah yang belum memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang memanfaatkan *e-Government*. Hal itu dikarenakan kebijakan tiap daerah berbeda-beda dan disesuaikan dengan skala prioritas dari masing-masing daerah.
4. Pelayanan IT
Layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat beragam. Teknologi informasi diharapkan bisa diterapkan untuk membantu berbagai pelayanan di desa/kelurahan agar lebih efektif dan efisien. Kebutuhan akan layanan masyarakat yang ada di desa adalah terkait dengan layanan administrasi kependudukan. Tiap-tiap daerah memiliki bentuk penerapan aplikasi yang berbeda untuk tiap desa. Di beberapa daerah penerapan dan pengembangan IT dalam aspek pelayanan masih belum maksimal. Namun demikian, penerapan IT kedepannya harus dapat mengakomodir semua kebutuhan layanan dengan pembuatan sistem yang baik.
5. Standar Pelayanan Administrasi Desa.
Dilihat dari kesiapan dalam penerapan layanan desa yang berbasis IT, masih belum

ada pemerintah daerah yang benar-benar serius dengan penerapannya. Hal tersebut tetap terjadi dengan daerah yang telah memiliki aturan sekalipun. Dikatakan demikian, karena belum adanya penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penggunaan IT.

Tujuan penerapan IT ini adalah untuk memecahkan kekurangan organisasi dan mempermudah pekerjaan pemerintah. Prasyarat adanya pengembangan pelayanan publik berbasis IT yang mencakup analisis situasi saat ini dikaitkan dengan semua sumber daya yang relevan untuk pembangunan, pemeliharaan dan penguatan dalam satu sistem *e-Government* tersebut. Sehingga, dengan adanya SPM dapat memberikan kejelasan tentang sistem layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Manfaat Penerapan TIK pada Administrasi Desa

Teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Diantaranya dapat membantu Perangkat Desa dalam melakukan kegiatan Tata Usaha Administrasi Desa. Manfaat tersebut diantaranya adalah

1. Memudahkan berkomunikasi dan memperoleh informasi
Bidang kegiatan tata usaha administrasi Desa, komunikasi merupakan hal terpenting yang dijalankan oleh Perangkat Desa. Tanpa adanya komunikasi maka kegiatan perkantoran di pemerintahan Desa tidak akan berjalan dengan baik. TIK mempermudah dalam memperoleh informasi. Perangkat Desa mudah dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber. TIK sangat membantu Perangkat Desa dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi bahwa TIK sangat mempermudah perangkat Desa dalam menyelesaikan pekerjaannya.
2. Mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat
Adanya TIK maka masyarakat bisa mengembangkan kemampuannya melalui berbagai hal, misalnya masyarakat menuangkan idenya melalui blog. TIK sangat bermanfaat bagi perangkat desa dalam
3. Menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan
TIK dalam kehidupan manusia sangat berperan penting, tanpa adanya TIK maka kehidupan manusia tidak akan maju serta tidak akan berkembang dalam artian mampu menuangkan ide kreatifnya dalam berbagai hal. TIK mampu meningkatkan dan menunjang kualitas pendidikan perangkat desa, karena dengan adanya TIK maka perangkat desa bisa melakukan pekerjaan administrasi desa dengan mudah. Perangkat desa mudah dalam melakukan pekerjaan kantor dengan bantuan TIK, salah satunya yaitu memanfaatkan komputer.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publik
Pelayanan publik sebaiknya bukan hanya mengikuti tren global, melainkan juga meliputi langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat. Kualitas publik akan meningkat dengan adanya TIK, karena dengan terciptanya *good governance* maka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik.
5. Mendorong pertumbuhan demokrasi
Efek positif dari fasilitas teknologi informasi dan komunikasi antara lain semua bebas menjadi sumber informasi. Terfasilitasinya kebutuhan akan kebebasan berbicara merupakan syarat dasar demokrasi. Penyebaran berlangsung secara *peer to peer*, *one to one*, *one to many* ataupun *broadcast*. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam proses demokrasi tidak terbatas dalam wahana persepsi saja bahkan lebih dari itu, TIK memberikan kontribusi dalam pemilu.
6. Menciptakan lapangan kerja serta membuka peluang bisnis baru
Adanya TIK memberikan peluang bagi masyarakat yang masih belum bekerja dan juga bagi perangkat desa yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Apabila bisa mengoperasikan

komputer dan aplikasi komputer dengan baik dan benar perangkat desa bisa menuangkan gagasan ke dalam sebuah artikel dan juga bisa membuat sebuah aplikasi untuk memudahkan dalam membantu pekerjaan administrasi desa. Misalnya perangkat desa membuat web desa yang menampilkan segala sesuatu mengenai desanya, dengan mampu membuat web maka perangkat desa mampu juga membuat web untuk membuka bisnis.

IV. KESIMPULAN

E-Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Implementasi penerapan IT di Pemerintahan Desa adalah dengan mengupayakan tersedianya jaringan komputer, sumber daya manusia yang mumpuni dan tersedianya sarana serta prasarana yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal. Selain itu, dengan menggunakan sistem IT data-data masyarakat yang ada dapat tersimpan dengan aman dan rapih. Kemudahan yang didapatpun dapat mengefektifkan kinerja para aparat desa.

Pembangunan pedesaan berbasis internet dilakukan melalui proses yang direncanakan secara bertahap. Ke depan inisiatif desa-desa untuk membangun dirinya sendiri harus didukung oleh *stakeholders* terutama pemerintah, dengan dukungan perguruan tinggi, swasta, LSM, dan praktisi teknologi informasi sebagainya. Apalagi dengan adanya UU Desa maka potensi pembangunan desa berbasis internet ke depan bisa semakin baik. Sehingga desa tidak lagi mengalami kesenjangan dalam pembangunan dan akses terhadap informasi.

Penerapan dan pengembangan TIK merupakan satu proses dimana sistem yang dibangun tidak bisa langsung sempurna tetapi dibangun secara bertahap dan diperbaiki agar memenuhi harapan pelayanan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan aparat desa sehingga menghasilkan sistem yang terintegrasi satu sama lainnya. Sistem yang sekarang dapat menjadi dasar untuk pengembangan sesuai dengan perubahan peraturan dari peraturan yang lama menjadi baru yakni Undang-Undang tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asep Syamsul Jazuli, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Informasi Desa*, Insan Desa Institute, 2017
<https://asepjazuli.blogspot.com/2017/08/pemanfaatan-teknologi-informasi-dan.html> (diakses Tgl. 5 September 2019)
- [2] Didit Praditya, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa*, Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol 17 No. 2, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), Bandung, 2014
- [3] Dwi Arin Fajriyani, Euis Siti Koriah, Esa Firmansyah, *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa*, STMIK Sumedang.
- [4] Fuji Febyanti Mulyana, M. Hilmi Ramdani, Sri Wulan Rahayu Santoso, *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (Studi Kasus Desa Licin Cimalaka)*, STMIK Sumedang.
- [5] Palvia, Shailendra C. Jain dan Sharma, Sushil S. (2007). *E-Government and EGovernance: Definitions/Domain Framework and Status around the World*. Di dalam Agarwal, Ashok, et al (eds.) *Foundations of E-government. 5TH International Conference On EGovernance*. Hyderabad, 2007.
- [6] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya
- [7] Unknown Posted, Oktober, 2013, *Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masyarakat Mentawai*,
<http://febripenya.blogspot.com/2013/10/manfaat-teknologi-informasi-dan.html> (diakses Tgl. 5 September 2019)